

INTISARI

Galih Prayudo¹, Susilo Andi Darma²

Waktu kerja lembur dan upah kerja lembur merupakan salah satu objek dari pengawasan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan Pengawasan penerapan waktu kerja lembur dan upah lembur oleh Disnakertrans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui problematika pelaksanaan pengawasan penerapan waktu kerja lembur dan upah lembur yang dialami oleh Disnakertrans Provinsi Daerah Istimewa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara. Analisis terhadap data dilakukan dengan cara telaah data primer dan data sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pengawasan penerapan waktu kerja lembur dan upah lembur oleh Disnakertrans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen wajib lapor ketenagakerjaan dengan dokumen asli yang berada di perusahaan. Pelaksanaan Pengawasan waktu kerja lembur dan upah lembur juga belum terlaksana secara maksimal karena adanya permasalahan jumlah pegawai pengawas yang tidak memadai, kurang dukungan sarana dan prasarana pengawasan, dan Perusahaan yang belum wajib lapor ketenagakerjaan belum menjadi prioritas pelaksanaan pengawasan padahal pelanggaran penerapan waktu kerja lembur dan upah lembur justru dijumpai pada perusahaan yang belum wajib lapor ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Pengawasan Ketenagakerjaan, Waktu Kerja Lembur, Upah Lembur

¹ Student of Law Magister, Faculty of Law, Gadjah Mada University of Yogyakarta, having his address at RT 04, RW 01, Purworejo, Central Java.

² Lecturer of Labour Law, At Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University of Yogyakarta, Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

ABSTRACT

Galih Prayudo³, Susilo Andi Darma⁴

Overtime work time and overtime pay are an object of labour inspection. This research aims to analyze and know the implementation of the inspection of the application overtime work time and overtime pay by Disnakertrans Yogyakarta Special Region and to know problematic implementation of inspection of the application overtime work time and overtime pay experienced by Disnakertrans Yogyakarta Special Region.

This research uses empirical juridical approach method. Data collection is done with library research and field research through interview. Analysis of data is done by primary data and secondary data. The conclusion in this research uses deductive thinking method.

The conclusion of this research is implementation of inspection of the application overtime work time and overtime pay by Disnakertrans Yogyakarta Special Region by examining the suitability of the required documents employment report with the original documents in the company. Implementation inspection overtime work time and overtime pay has not been maximally because of the problems of inadequate number of inspection staff, lack of monitoring facilities and infrastructure, and companies not yet to required to report employment documents has not been a priority of implementation of the labour inspection whereas violations of the overtime work time and overtime work pay are found in companies that are not yet required to report employment documents.

Keyword : Labour Inspection, Overtime Work Time, Overtime Pay

³ Student of Law Magister, Faculty of Law, Gadjah Mada University of Yogyakarta, having his address at RT 04, RW 01, Purworejo, Central Java.

⁴ Lecturer of Labour Law, At Department of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University of Yogyakarta, Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta..